

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. 2017. “Pembayaran dan Penyetoran”, <https://www.pajak.go.id/id/pembayaran-dan-penyetoran-pajak>, diakses tanggal 15 Maret 2020 pukul 13.35.
- Direktorat Jendral Pajak. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jendral Pajak. 2017. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jendral Pajak. 2019. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jendral Pajak. 2019. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jendral Pajak. 2019. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017*. Jakarta: Sekretariat Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jendral Pajak. 2010. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 09/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. “Informasi APBN 2020”, <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/>, diakses tanggal 16 Februari 2020 pukul 08.20.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Semen Indonesia. 2019. “Profil Perusahaan”, <http://www.semenindonesia.com/profil-perusahaan>, diakses tanggal 14 Februari 2020 pukul 14.00.

Semen Indonesia. 2019. “Visi dan Misi”, <https://semenindonesia.com/visi-misi/>, diakses tanggal 14 Februari 2020 pukul 14.05

Semen Indonesia. 2019. “Sistem Manajemen Good Corporate Governance”, <http://www.semenindonesia.com/sistem-manajemen>, diakses tanggal 14 Februari 2020 pukul 14.10.

Semen Indonesia. 2019. *Surat Keputusan Direksi Nomor 021/Kpts/Dir/2019 tentang Struktur Organisasi*.

Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.